

## ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA NEGARA UNTUK MENILAI RASIO EFISIENSI DAN RASIO EFEKTIFITAS ANGGARAN PADA PENYELENGGARA BUDDHA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Rika Agustin<sup>1</sup>, Dede Puspa Pujia<sup>2</sup>, Erni Yulianti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tangerang Raya

<sup>1</sup>email: [kristiyanhadil64@gmail.com](mailto:kristiyanhadil64@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tangerang Raya

<sup>2</sup>email: [puspakhia@gmail.com](mailto:puspakhia@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tangerang Raya

<sup>3</sup>email: [erni.pertiwi@gmail.com](mailto:erni.pertiwi@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to assess the efficiency and effectiveness of the implementation of the state budget by the Buddhist Organizers at the Ministry of Religious Affairs Office in Tangerang Regency. The method used in this study is a quantitative descriptive approach, with data collection through field activities, in-depth interviews, observation, documentation, and literature review. The research findings show that the budget efficiency ratio in the 2020–2023 period is in the very efficient category, with successive achievements of 4.33%; 0.02%; 2.30%; and 0.00%, without any exceedance of the predetermined budget limit. In addition, the budget management effectiveness ratio has also proven effective, namely 95.67%; 99.98%; 97.70%; and 100.00%, with the highest effectiveness achievement occurring in 2023.*

**Keywords:** State Budget Realization, Effectiveness, Efficiency

### ABSTRAK

*Penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai efisiensi serta efektivitas pelaksanaan anggaran belanja negara yang dilakukan oleh Penyelenggara Buddha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang. Metode yang dipakai dalam penelitian berupa pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui kegiatan lapangan, wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, serta kajian pustaka. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa rasio efisiensi anggaran belanja pada periode 2020–2023 berada dalam kategori sangat efisien, dengan capaian berturut-turut sebesar 4,33%; 0,02%; 2,30%; dan 0,00%, tanpa adanya pelampauan terhadap batas anggaran yang telah ditentukan. Selain itu, rasio efektivitas pengelolaan anggaran juga terbukti efektif, yaitu sebesar 95,67%; 99,98%; 97,70%; dan 100,00%, dengan pencapaian efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2023.*

**Kata kunci:** Realisasi Anggaran Belanja Negara, Efektivitas, Efisiensi

## I. PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Instansi pemerintah merujuk pada seluruh entitas yang memiliki peran dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Entitas ini mencakup lembaga, komisi, panitia, maupun dewan yang memperoleh pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk memastikan kinerja yang efektif dan transparan, instansi pemerintah dituntut memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas tersebut diperlukan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat, serta untuk menumbuhkan nilai kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab terhadap publik (Nevi Costari & Putri Ariella Belinda, 2021).

Sejak tahun 2019, Penyelenggara Buddha resmi dibentuk dan beroperasi di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang. Pembentukan unit ini didasarkan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 592 huruf j. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa tugas utama Penyelenggara Buddha meliputi pelayanan, pemberian bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan perencanaan dan pelaporan yang berkaitan dengan urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha di wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (<https://tangerang.kemenag.go.id/Penyelenggara-Buddha>, 2024).

Efisiensi dan efektivitas memegang peranan penting dalam proses realisasi anggaran pada setiap kementerian negara atau lembaga. Ketika tingkat efisiensi dan efektivitas tercapai secara optimal, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program pemerintah telah berlangsung sesuai dengan alokasi anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Isu terkait efisiensi dan efektivitas anggaran menjadi perhatian umum di lingkungan instansi pemerintah, di mana banyak lembaga berupaya memenuhi kedua kriteria tersebut dalam proses penyerapan anggaran. Namun demikian, pencapaian efisiensi dan efektivitas tidak selalu mudah diwujudkan, karena lembaga pemerintah dituntut untuk merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan secara tepat. Kegagalan dalam menyerap anggaran secara maksimal akan menghambat pencapaian kedua indikator tersebut. Oleh karena itu, untuk menilai apakah realisasi anggaran telah berjalan secara efektif dan efisien, perlu dilakukan perbandingan antara dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan realisasi anggaran dari kementerian atau lembaga yang bersangkutan (Prasetyo & Nugraheni, 2020)

Hasil dari para peneliti sebelumnya menunjukkan beberapa hasil sebagai berikut: Hasil penelitian dari (Prasetyo & Nugraheni, 2020) dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder. Analisis difokuskan pada variabel efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang bervariasi setiap tahunnya. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan persentase 93% yang masuk kategori efektif, sedangkan efektivitas terendah tercatat pada tahun 2017 dengan persentase 76,91% yang dikategorikan kurang efektif. Adapun tingkat efisiensi penyerapan anggaran selama periode 2015–2019 secara keseluruhan dinyatakan tidak efisien. Hasil penelitian (Lisnasari et al., 2022) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus analisis pada variabel efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas anggaran selama periode 2017 hingga 2020 mencapai rata-rata 92,16%, yang termasuk dalam kategori “efektif”. Sementara itu, tingkat efisiensi anggaran pada periode yang sama tercatat rata-rata sebesar 46,61%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran tergolong “sangat efisien”. Selain itu, hasil perhitungan selisih (varian) antara anggaran dan realisasi belanja selama tahun anggaran 2017–2020 dinilai baik karena tidak terdapat realisasi belanja yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Hasil penelitian (Zhafiri & Trisnansih, 2023) dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dengan variabel yang dianalisis mencakup efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Jawa Timur selama periode anggaran 2019–2021. Hasil penelitian menghasilkan dua temuan utama. Pertama, pendapatan asli daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur selama periode tersebut menunjukkan rata-rata efektivitas sebesar 130,52% yang termasuk kategori sangat efektif, sehingga kinerja keuangan dalam merealisasikan pendapatan dapat dikatakan optimal. Kedua, tingkat efisiensi belanja daerah pada periode yang sama menunjukkan rata-rata 96,08% yang berada dalam kategori kurang efisien. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan anggaran belanja oleh dinas terkait belum maksimal dan masih memerlukan perbaikan dalam pengendalian pengeluaran agar dana dapat dimanfaatkan secara lebih hemat

dan tepat sasaran. Hasil penelitian (Welay & Saidekut, 2024) menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menganalisis dua variabel utama, yaitu rasio efisiensi anggaran dan rasio efektivitas anggaran. Rasio efisiensi berfungsi untuk menilai sejauh mana penggunaan anggaran dilakukan secara optimal tanpa menimbulkan pemborosan, dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya, rasio efektivitas dipakai untuk mengukur kemampuan anggaran dalam mencapai target yang direncanakan. Berdasarkan hasil analisis laporan realisasi anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Aru pada periode 2017–2019 (sebelum pandemi Covid-19), diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan secara efektif dan efisien. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran serta pencapaian kinerja instansi sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, tanpa menimbulkan pemborosan sumber daya. Dan hasil penelitian dari (Verahastuti et al., 2024) dengan menerapkan metode studi pustaka (library research) sebagai pendekatan penelitian. Variabel utama yang dianalisis adalah realisasi anggaran yang merujuk pada jumlah anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2021 hingga 2022. Rasio efektivitas digunakan untuk menilai seberapa besar capaian realisasi belanja dibandingkan dengan target anggaran yang direncanakan. Sementara itu, rasio efisiensi dipakai untuk mengukur seberapa efisien penggunaan anggaran dengan cara membandingkan belanja langsung dengan total realisasi belanja. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara selama tahun 2021 dan 2022 tergolong cukup efektif, meskipun tingkat efisiensinya masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2021, rasio efektivitas mencapai 87%, termasuk dalam kategori cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2022, anggaran tetap berada di kategori yang sama dengan rasio sebesar 83%. Di sisi lain, tingkat efisiensi anggaran tahun 2021 mencapai 120%, yang menandakan penggunaan anggaran belum efisien. Meskipun pada tahun 2022 terjadi perbaikan menjadi 114%, angkanya masih menunjukkan kurangnya efisiensi dalam penyerapan anggaran. Kesimpulannya, meskipun pelaksanaan anggaran tergolong cukup efektif, manajemen keuangan pada Dinas tersebut masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan efisiensi penggunaan anggaran publik, sehingga perbaikan sistem pengelolaan anggaran menjadi hal penting untuk diterapkan ke depannya.

Fenomena yang terjadi pada penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang adalah permasalahan daya serap anggaran menjadi isu yang berulang setiap tahunnya. Adapun realisasi daya serap anggaran dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini :

**Tabel 1**  
**Target Belanja dan Realisasi Belanja**  
**Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang**  
**(Tahun 2020-2023)**

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
2020	134,771,000	128,928,955
2021	507,584,000	507,468,539
2022	316,875,000	309,583,008
2023	458,972,000	458,972,000

Sumber : Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, 2024

Jika dilihat dari fenomena tabel 1 diatas dapat diamati bahwa realisasi belanja dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi, dengan kenaikan dan penurunan setiap tahunnya yang dimana hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanjanya mengalami fluktuatif. Meskipun efektifitas dan efesiensi dalam pengelolaannya belum di ketahui. Oleh karena itu diperlukan langkah analitis untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan dua pokok masalah. Pertama, seberapa besar tingkat efisiensi dan efektivitas realisasi anggaran belanja negara pada Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang. Kedua, seberapa besar efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan jika dilihat dari perbandingan antara pagu anggaran dengan realisasi yang dicapai setiap tahun anggaran. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas realisasi anggaran belanja negara pada Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang serta memberikan gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan melalui perbandingan antara batas anggaran dan hasil realisasi pada tiap periode anggaran tahunan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, dan analisis data keuangan yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga publik. Tujuan utama dari proses ini adalah menyusun laporan keuangan yang mampu memberikan informasi penting kepada pemangku kepentingan dalam mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, akuntansi sektor publik juga berperan sebagai sistem pelaporan keuangan bagi organisasi yang beroperasi di sektor publik. Saat ini, penerapan akuntansi di lembaga publik semakin mendapat perhatian, baik dari kalangan akuntan sektor publik maupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Madjid, 2019, *Akuntansi sektor publik, Vol 20 : Hal. 5-6*).

### Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Ruang lingkup akuntansi sektor publik mencakup seluruh institusi pemerintahan serta organisasi nirlaba. Akuntansi sektor publik memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan penerapan dan perlakuan akuntansi yang berlaku di dalamnya. Jika dibandingkan dengan sektor swasta yang ruang lingkupnya lebih terbatas, cakupan sektor publik jauh lebih luas dan kompleks. Luasnya cakupan tersebut dipengaruhi oleh keberagaman bentuk organisasi dan dinamika lingkungan yang berdampak langsung pada operasional lembaga publik. Dari segi kelembagaan, sektor publik mencakup berbagai entitas seperti pemerintah pusat dan daerah, satuan kerja perangkat pemerintah, perusahaan milik negara maupun daerah (BUMN dan BUMD), serta organisasi lain, termasuk partai politik, LSM, lembaga kesehatan, institusi pendidikan tinggi, dan berbagai organisasi nirlaba sejenis (Nevi Costari & Putri Ariella Belinda, 2021).

### Value For Money (VFM)

*Value for Money* (VFM) merupakan prinsip penting yang digunakan dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Konsep ini berbeda dari *time value of money* dalam akuntansi maupun manajemen keuangan, meskipun sama-sama menggunakan istilah “value” dan “money”. *Time value of money* menjelaskan bahwa nilai uang mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, sedangkan *value for money* menekankan penggunaan dana secara optimal agar menghasilkan manfaat maksimal. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan sektor publik wajib dikelola secara bertanggung jawab dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas untuk memperoleh hasil terbaik (Mahmudi, 2019, *Manajemen kinerja sektor publik, Vol : 96/259 Hal 83*).

Sektor publik kerap diasosiasikan sebagai wilayah yang rawan terhadap pemborosan, sumber kebocoran anggaran, serta lembaga yang sering mengalami kerugian. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik, muncul dorongan agar organisasi di sektor publik menerapkan prinsip *Value for Money* dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Prinsip *Value for Money* merupakan landasan utama dalam manajemen organisasi sektor publik, yang mencakup tiga komponen penting: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Unsur ekonomis merujuk pada kemampuan organisasi dalam memperoleh

dan mendistribusikan sumber daya secara hemat dan tepat. Komponen efisiensi mengukur sejauh mana pemanfaatan sumber daya dilakukan secara optimal untuk menghasilkan keluaran maksimal. Sementara itu, efektivitas mengevaluasi pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Kinerja pengelolaan anggaran yang baik menjadi inti dari penerapan prinsip *Value for Money*, dan harus dijalankan secara konsisten dalam setiap aktivitas lembaga. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran sektor publik. *Value for Money* dapat tercapai ketika organisasi mampu menekan biaya masukan tanpa mengorbankan hasil keluaran, sehingga tujuan institusional tetap tercapai secara optimal (Makmur, 2022).

### **Efisiensi**

Efisiensi merujuk pada kemampuan suatu entitas dalam menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan sumber daya seminimal mungkin. Pada dasarnya, istilah “efisiensi” memiliki kedekatan makna dengan “ekonomis”, karena keduanya sama-sama menekankan pentingnya pengurangan biaya dan optimalisasi pengeluaran. Efisiensi dinyatakan dalam bentuk rasio, dan tingkatnya dapat ditingkatkan melalui beberapa pendekatan. Salah satu caranya adalah dengan menaikkan jumlah output tanpa menambah input, atau dengan menaikkan output dalam proporsi yang lebih besar dibandingkan kenaikan input. Alternatif lainnya adalah dengan mengurangi jumlah input dalam proporsi yang lebih besar daripada penurunan output yang terjadi. Dengan demikian, efisiensi dapat ditingkatkan baik melalui penghematan sumber daya maupun melalui peningkatan hasil kerja dengan sumber daya yang tersedia (Makmur, 2022).

### **Efektifitas**

Efektifitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi mampu merealisasikan tujuan yang telah direncanakan. Suatu anggaran pemerintah dapat dikategorikan sebagai efektif apabila sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil dicapai secara optimal. Dalam konteks pengukuran efektifitas, fokus utama bukan terletak pada jumlah dana yang dibelanjakan, melainkan pada tingkat keberhasilan dalam pencapaian hasil yang telah ditargetkan (Prasetyo & Nugraheni, 2020).

### **Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik merujuk pada kewajiban pemerintah sebagai pelaksana amanah dalam mengelola sumber daya milik masyarakat serta melaporkan hasil kinerjanya kepada publik sebagai pihak yang memiliki otoritas. Oleh karena itu, proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilakukan dengan tertib, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan berlandaskan pada prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, serta pertanggungjawaban. Selain itu, pelaksanaannya juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan. Tingkat akuntabilitas publik yang baik dapat tercermin melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah yang bersifat menyeluruh dan mengandung informasi yang transparan (*full disclosure*) (Susanti A et al., 2021).

### **Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan menggambarkan tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan program atau kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Pada sektor publik, sistem pengukuran kinerja disusun untuk membantu manajer menilai keberhasilan strategi dengan menggunakan indikator finansial maupun non-finansial. Evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah berfungsi sebagai instrumen untuk menilai kualitas kinerja pemerintah. Salah satu metode yang sering dipakai adalah analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) yang telah disusun serta direalisasikan. Kajian atas realisasi APBN melalui pendekatan rasio keuangan diperlukan agar standar pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan. Penilaian kinerja, terutama terkait keberhasilan atau kegagalan program, didasarkan pada sistem pengukuran yang terstruktur. Terdapat tiga alasan utama dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik, yaitu untuk meningkatkan kualitas kinerja, menjadi dasar pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, serta sebagai alat untuk menilai efektivitas pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan hasil keuangan antarperiode guna mengidentifikasi tren kinerja (Mandua et al., 2023).

**Penyerapan Anggaran**

Penyerapan anggaran menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah, khususnya dalam mendukung aktivitas perekonomian. Aspek ini juga berfungsi sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249/PMK.02/2011 Pasal 4 Ayat 2, yang menegaskan bahwa evaluasi implementasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian output. Secara umum, penyerapan anggaran diartikan sebagai tingkat realisasi anggaran terhadap estimasi yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam istilah sehari-hari, konsep ini sering disebut sebagai pencairan anggaran. Namun, dalam praktik birokrasi pemerintahan maupun organisasi sektor publik, penyerapan anggaran lebih tepat dipahami sebagai realisasi anggaran yang tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode tertentu (Sulastrri, 2023).

**II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan sumber data berupa realisasi anggaran belanja negara pada Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang periode 2020–2023. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan, wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Lokasi penelitian berada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, dengan waktu pelaksanaan pada Maret–April 2025.

**Teknik Analisis**

Peneliti menerapkan teknik analisis data dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik tertentu dari objek penelitian melalui proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data yang tersedia. Tujuan dari analisis ini adalah memberikan pemahaman yang terukur mengenai kondisi yang dikaji, berdasarkan data numerik yang telah diperoleh. Peneliti menggunakan data keuangan berupa laporan realisasi anggaran dari Penyelenggara Buddha, yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan pemerintah untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Berikut rasio - rasio yang digunakan pada penelitian ini :

**a. Analisis Rasio Efisiensi**

Rasio efisiensi belanja menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja. Rasio ini berfungsi untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu menghemat penggunaan anggaran. Pemerintah dianggap efisien dalam penggunaan anggaran apabila nilai rasio efisiensinya berada di bawah angka 100%. Namun, jika nilai rasio melebihi 100%, hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pemborosan dalam pengelolaan anggaran (Mahmudi, 2019 ; Siallagan & Kusmilawaty, 2024). Efisien belanja dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Total Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 2. Kriteria Penilaian Efisiensi**

Rasio Efisiensi (%)	Kriteria Efisiensi
Di atas 100	Tidak efisien
90-100	Kurang efisien
80-90	Cukup efisien
60-80	Efisien
Di bawah 60	Sangat Efisien

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 (Lisnasari et al., 2022)

**b. Analisis Rasio Efektifitas**

Rasio efektivitas belanja menunjukkan perbandingan antara jumlah realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa efektif pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia. Jika nilai rasio efektivitas melebihi angka 100%, maka hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran tergolong efektif. Namun, jika nilainya berada di bawah 100%, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran belum berjalan secara optimal atau belum efektif (Mahmudi, 2019 ; Siallagan & Kusmilawaty, 2024). Efektifitas belanja dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 3. Kriteria Penilaian Efektifitas**

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria Efektifitas
Di atas 100	Sangat efektif
90-100	efektif
80-90	Cukup efektif
60-80	Kurang efektif
Di bawah 60	Tidak efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 (Lisnasari et al., 2022)

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 menetapkan bahwa belanja negara merupakan kewajiban pemerintah pusat yang dicatat sebagai pengurang kekayaan bersih nasional. Belanja negara mencakup pengeluaran pemerintah pusat serta alokasi transfer ke daerah dan dana desa, yang difungsikan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan penyediaan layanan publik. Berdasarkan klasifikasi fungsinya, belanja pemerintah pusat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan di berbagai bidang, antara lain pelayanan umum, keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, penyediaan perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, urusan agama, pendidikan, serta perlindungan sosial (Habibi, 2021).

**1. Realisasi Belanja Operasi**

Belanja operasional dan belanja modal menjadi dua komponen utama yang membentuk struktur belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam konteks ini, Penyelenggara Buddha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang telah merealisasikan anggaran untuk belanja operasional dan belanja modal selama periode 2020 hingga 2023. Data realisasi anggaran tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut yang menggambarkan perkembangan alokasi dan penggunaan anggaran pada masing-masing tahun.

**Tabel 4**  
**Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Operasi T.A 2020 – 2023**

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Pegawai	32,771,000	28,597,605	125,831,000	125,745,539
2	Belanja Barang	34,000,000	33,836,000	381,753,000	381,723,000
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>66,771.000</b>	<b>62,433,605</b>	<b>507,584,000</b>	<b>507,468,539</b>

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Anggaran 2023	Realisasi 2023
1	Belanja Pegawai	141,162,000	133,970,708	00,0	00,0
2	Belanja Barang	175,713,000	175,612,300	458,972,000	458,972,000
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>316,875,000</b>	<b>309,583,008</b>	<b>458,972,000</b>	<b>458,972,000</b>

Sumber : Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, 2024

Berdasarkan Tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi belanja operasional dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi daya serap anggaran setiap tahunnya. Tingkat penggunaan anggaran menunjukkan variasi, dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2020 tercatat sebesar 93,50%, Tahun 2021 sebesar 99,98%, Tahun 2022 sebesar 97,70%, dan tahun 2023 mencapai 100,00%. Tahun 2023 menjadi tahun dengan tingkat daya serap tertinggi, yaitu 100,00% dari total anggaran yang tersedia. Persentase daya serap anggaran diperoleh dengan membagi jumlah realisasi belanja terhadap total anggaran yang dialokasikan, lalu dikalikan 100 persen untuk memperoleh hasil dalam bentuk persentase.

## 2. Realisasi Belanja Modal

Belanja Modal merujuk pada pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk pembelian atau pembangunan aset yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tersebut bisa berupa kendaraan, mesin, maupun peralatan kerja lainnya yang termasuk dalam kategori barang tidak habis pakai. Selain itu, belanja modal juga dapat digunakan untuk pemeliharaan atau perbaikan aset dengan tujuan memperpanjang umur pakai dan meningkatkan fungsionalitasnya. Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang menggunakan belanja modal untuk pengadaan kendaraan dinas serta peralatan dan mesin yang mendukung kegiatan operasional jangka panjang. Adapun tabel realisasi anggaran belanja operasi dan belanja modal untuk tahun 2020 disajikan pada bagian berikutnya.

**Tabel 5**  
**Laporan Realisasi Belanja Modal T.A 2020**

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1.	Belanja Modal	68,000,000	66,495,350
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>68,000,000</b>	<b>66,495,350</b>

Sumber : Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa tingkat penyerapan anggaran Belanja Modal tahun 2020 mencapai 97,79% dari total anggaran yang telah dialokasikan. Persentase penyerapan ini dihitung dengan membagi nilai realisasi belanja dengan jumlah anggaran yang tersedia, kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh hasil dalam bentuk persentase.

**3. Perhitungan dan Analisis Rasio Efisiensi dan Efektifitas Belanja Negara**

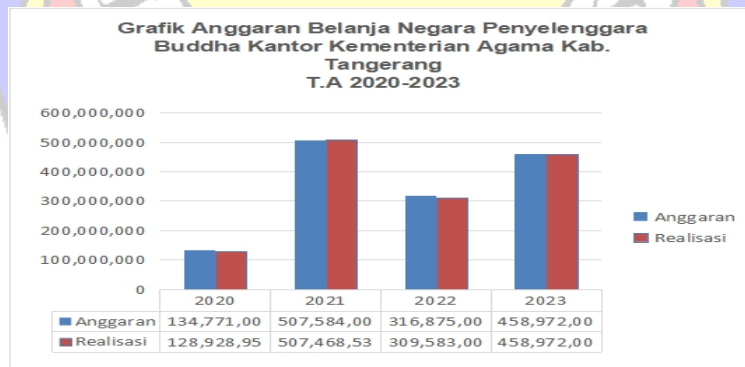
**a. Analisis Rasio Efisiensi Belanja Negara**

**Tabel 6**  
**Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Negara**  
**Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kab. Tangerang**  
**T.A 2020-2023**

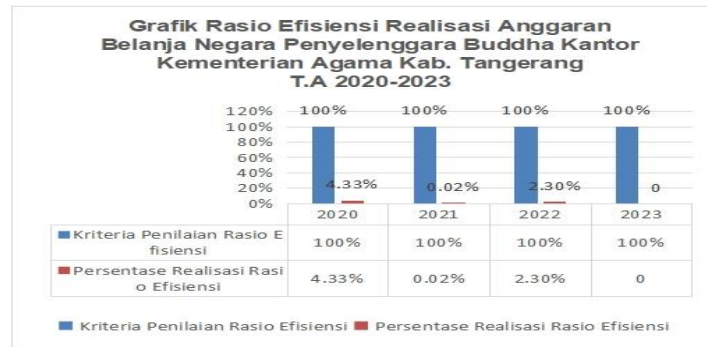
Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi %	Tingkat Efisiensi %	Ket
2020	134,771,000	128,928,955	95.67%	4,33%	Sangat Efisien
2021	507,584,000	507,468,539	99.98%	0,02%	Sangat Efisien
2022	316,875,000	309,583,008	97.70%	2,3%	Sangat Efisien
2023	458,972,000	458,972,000	100.00%	0,00%	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah penulis, 2025

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa rasio efisiensi belanja Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang selama tahun anggaran 2020 hingga 2023 tergolong sangat efisien. Hal ini ditunjukkan dari kemampuan satuan kerja dalam menghemat anggaran belanja. Pada tahun 2020, instansi tersebut merealisasikan anggaran sebesar 95,67% dari total anggaran yang ditetapkan, sehingga terdapat sisa anggaran tidak terealisasi sebesar 4,33%. Persentase ini menunjukkan efisiensi yang sangat baik karena berada di bawah ambang batas 60% dari total anggaran. Selanjutnya, pada tahun 2021, tingkat realisasi anggaran mencapai 99,98%, dengan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar 0,02%, yang juga masuk dalam kategori sangat efisien. Pada tahun 2022, realisasi anggaran tercatat sebesar 97,70%, menyisakan 2,30% anggaran yang tidak terserap, yang tetap memenuhi kriteria efisiensi tinggi. Sementara itu, pada tahun 2023, instansi berhasil merealisasikan anggaran secara penuh sebesar 100,00%, sehingga tidak terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan. Kondisi ini menunjukkan tingkat efisiensi maksimal karena penggunaan anggaran sesuai dengan target sepenuhnya.



**Gambar 1. Grafik Anggaran Belanja Negara Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kab. Tangerang T.A 2020-2023**



**Gambar 2. Grafik Rasio Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Negara Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kab. Tangerang T.A 2020-2023**

Jika merujuk pada grafik Anggaran Belanja Negara Penyelenggara Buddha di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang untuk periode tahun 2020 hingga 2023, terlihat bahwa realisasi anggaran belanja selalu lebih rendah dibandingkan dengan jumlah anggaran yang direncanakan. Baik total anggaran maupun realisasinya mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan tahun 2023. Pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.507.584.000 dan berhasil merealisasikan Rp.507.468.539, yang menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 0,02%, menandakan efisiensi yang sangat tinggi. Demikian pula, pada tahun 2023, jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 458.972.000 berhasil direalisasikan sepenuhnya tanpa sisa, menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 0,00%, yang merupakan indikator efisiensi tertinggi selama empat tahun terakhir. Sebaliknya, pada tahun 2020 dan 2022, anggaran dan realisasi mengalami penurunan. Tahun 2020 mencatat alokasi anggaran sebesar Rp. 134.771.000 dengan realisasi Rp. 128.928.955, yang menghasilkan efisiensi sebesar 4,33% masih dalam kategori efisien. Sementara itu, pada tahun 2022, dari total anggaran sebesar Rp.316.875.000, realisasi mencapai Rp.309.583.008, dengan tingkat efisiensi sebesar 2,3%, juga menunjukkan efisiensi yang baik. Secara keseluruhan, tahun 2023 mencatatkan efisiensi anggaran tertinggi, karena seluruh anggaran berhasil diserap secara optimal tanpa sisa.

**b. Analisis Rasio Efektifitas**

**Tabel 7**  
**Rasio Efektifitas Anggaran Belanja Negara Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kab. Tangerang T.A 2020-2023**

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi %	Ket
2020	134,771,000	128,928,955	95.67%	Efektif
2021	507,584,000	507,468,539	99.98%	Efektif
2022	316,875,000	309,583,008	97.70%	Efektif
2023	458,972,000	458,972,000	100.00%	Efektif

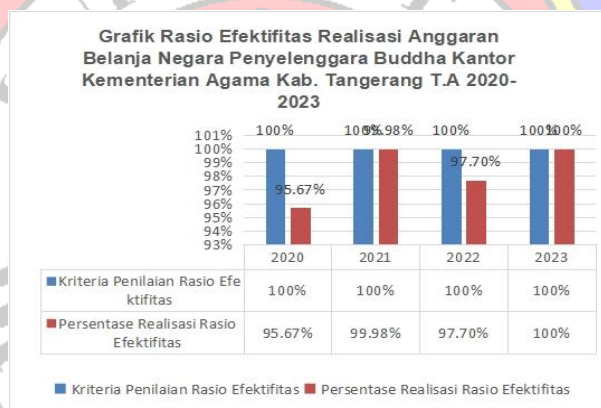
Sumber : Data diolah penulis, 2025

Berdasarkan hasil penelitian, rasio efektifitas belanja yang dicapai oleh Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang selama tahun anggaran 2020 hingga 2022 belum memenuhi target yang telah ditetapkan, meskipun nilai persentasenya

masih tergolong dalam kategori efektif, yaitu masing-masing sebesar 95,67%, 99,98%, dan 97,70%. Kondisi ini terjadi karena realisasi anggaran belanja berada di bawah target anggaran yang direncanakan pada masing-masing tahun tersebut. Sebaliknya, pada tahun 2023, rasio efektivitas belanja berhasil mencapai target secara penuh, yaitu sebesar 100,00%, yang mengindikasikan bahwa seluruh anggaran telah direalisasikan secara optimal dan masuk ke dalam kategori efektivitas tinggi dalam pelaksanaan anggaran belanja.



**Gambar 3. Grafik Anggaran Belanja Negara Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kab. Tangerang T.A 2020-2023**



**Gambar 4. Grafik Rasio Efektifitas Anggaran Belanja Negara Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kab. Tangerang T.A 2020-2023**

Grafik Anggaran Belanja Negara yang ditampilkan oleh Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja belum sepenuhnya mencapai jumlah anggaran yang ditargetkan selama tahun anggaran 2020 hingga 2023. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.507.584.000 pada tahun 2021, dan berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp.507.468.539, sehingga tingkat efektivitasnya mencapai 99,98%, yang mencerminkan penggunaan anggaran yang sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah anggaran dan realisasi masing-masing tercatat sebesar Rp.458.972.000, menghasilkan efektivitas 100,00%, yang menandakan bahwa anggaran telah terserap secara sempurna. Sebaliknya, pada tahun 2020, alokasi anggaran sebesar Rp.134.771.000 hanya terealisasi Rp.128.928.955, menghasilkan tingkat efektivitas sebesar 95,67%, yang tergolong efektif namun belum optimal. Sementara itu, pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.316.875.000 direalisasikan sebesar Rp.309.583.008,

sehingga rasio efektivitasnya tercatat 97,70%. Secara keseluruhan, tingkat efektivitas tertinggi dalam pengelolaan anggaran terjadi pada tahun 2023, karena seluruh dana berhasil digunakan sesuai target yang telah ditetapkan.

#### IV. KESIMPULAN

Dari penjelasan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal penting terkait efektivitas dan efisiensi anggaran belanja. Suatu anggaran belanja dapat dikatakan efektif apabila target anggaran lebih besar dibandingkan jumlah realisasi yang dicapai dalam periode anggaran tertentu. Sebaliknya, apabila anggaran belanja lebih kecil dibandingkan realisasi anggarannya, maka tingkat efektivitasnya dapat dikategorikan cukup efektif atau bahkan tidak efektif. Efisiensi anggaran, di sisi lain, menunjukkan hasil yang berbanding terbalik dengan efektivitas. Anggaran belanja dapat dianggap efisien jika jumlah anggaran yang digunakan lebih kecil daripada realisasi yang dicapai. Namun, jika realisasi anggaran lebih rendah daripada jumlah anggaran yang direncanakan, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dinilai kurang efisien. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran perlu dianalisis secara bersamaan agar pengelolaan keuangan instansi dapat berjalan optimal dan akuntabel.

##### 1. Rasio Efisiensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang mengelola anggaran belanja negara secara sangat efisien pada periode 2020–2023. Peneliti menemukan bahwa realisasi anggaran belanja setiap tahun tidak pernah melampaui jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Tingkat efisiensi anggaran tercermin melalui rasio efisiensi sebesar 4,33% pada tahun 2020, 0,02% pada tahun 2021, 2,3% pada tahun 2022, dan 0,00% pada tahun 2023. Seluruh capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran dalam kurun waktu tersebut berada pada kategori sangat efisien.

##### 2. Rasio Efektifitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas pengelolaan Anggaran Belanja Negara oleh Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang telah berjalan secara efektif selama periode tahun anggaran 2020 hingga 2023. Persentase efektivitas tercatat sebesar 95,67% pada tahun 2020, 99,98% pada tahun 2021, 97,70% pada tahun 2022, dan 100,00% pada tahun 2023. Tingkat efektivitas tertinggi berhasil dicapai pada tahun 2023, yaitu dengan realisasi anggaran yang sepenuhnya sesuai target sebesar 100,00%.

#### V. REFERENSI

- Habibi. (2021). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Apbn) Pada Institut Agama Islam Negeri Bone. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(2), 122–132.
- Lisnasari, L., Guasmin, G., & Haryani, S. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(2), 89–95. <https://doi.org/10.56338/Jks.V5i2.2232>
- Madjid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. In *Yogyakarta* (Nomor 25).
- Mahmudi, S. E. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*.
- Makmur, A. A. R. (2022). Analysis Of Value For Money And Accountability In Improving Public Services At The Makassar City Water Corporation. *Journal Of Accounting*, 2(2), 87–103.
- Mandua, T. L., Numberi, C. L., & Werimon, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Periode 2017 - 2021. *Lensa Ekonomi*, 16(02), 237. <https://doi.org/10.30862/Lensa.V16i02.249>
- Nevi Costari, & Putri Ariella Belinda. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor

- Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77. [https://doi.org/10.36563/Jamanta\\_Unita.V1i1.421](https://doi.org/10.36563/Jamanta_Unita.V1i1.421)
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 1–10.
- Siallagan, Y. T., & Kusmilawaty, K. (2024). Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dan Kinerja Keuangan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah (Jupiekes)*, 2(1).
- Sulastri, C. K. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Daerah. *Manajemen ,Akuntansi*, 364–374.
- Susanti A, Riadi S, & Sari D. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai*, 5(3), 153–162.
- Verahastuti, C., Sitorus, A. N., Chantika, A., & Hakim, M. (2024). *Analysis Of Budget Effectiveness And Efficiency At The Public Works Department Of Kutai Kartanegara Regency*. 07(02), 29–35.
- Welay, P. A., & Saidekut, A. (2024). *Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Aru*. 2(3).
- Zhafiri, R. G., & Trisnarningsih, S. (2023). Analysis Of The Effectiveness And Efficiency Of Regional Revenue And Expenditure Budget In The Service Of Cooperations And Smes In East Java Province. *Costing:Journal Of Economic, Business And Accounting*, 6, 2435–2445.
- <https://Tangerang.Kemenag.Go.Id/Penyelenggara-Buddha;>